

# Peran Keuangan Publik dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan terhadap Kota Baubau

**Murni Sari<sup>1\*</sup>**

**Filasti Rahma<sup>2</sup>**

**Wilda Fatmala<sup>3</sup>**

**Eva Handayani<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Politeknik Baubau, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [murnisari584@gmail.com](mailto:murnisari584@gmail.com)

**Abstract.** This study aims to analyze the influence of public financial policy, public financial practices, and community participation on sustainable development in Baubau City. This research employs a quantitative design with a survey approach, involving 399 respondents selected using the Slovin formula from a total population of 166,150 individuals. Data were collected through questionnaires using a Likert scale to measure respondents' perceptions of public financial policy, public financial practices, community participation, and sustainable development. Data analysis was conducted using validity and reliability tests, as well as multiple linear regression analysis. The findings show that public financial policies, practices, and community involvement significantly impact sustainable development in Baubau City. These findings underscore the importance of effective, transparent, and participatory financial management in supporting sustainable development. The implications of this study suggest the need for improved implementation of sustainable financial policies and active community participation to achieve more inclusive development goals in Baubau City.

**Keywords:** Community Participation; Public Financial Practices; Public Financial Policy; Sustainable Development.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan keuangan publik, praktik keuangan publik, dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan survei, melibatkan 399 responden yang dipilih menggunakan rumus Slovin dari total populasi sebanyak 166.150 individu. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap kebijakan keuangan publik, praktik keuangan publik, partisipasi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, serta analisis regresi linier berganda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan, praktik, dan keterlibatan masyarakat secara signifikan berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif,

transparan, dan partisipatif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif di Kota Baubau.

**Kata kunci:** Kebijakan Keuangan Publik; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Berkelanjutan; Praktik Keuangan Publik.

---

**Article Info:**

Received: September 1, 2024

Accepted: October 4, 2024

Available online: June 30, 2025

DOI: <http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v14i2.1922>

---

## LATAR BELAKANG

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang berusaha mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri (World Commission on Environment and Development, 1987). Di Indonesia, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin dalam berbagai kebijakan nasional, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan publik yang efektif dan efisien sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut (Bappenas, 2020).

Keuangan publik memegang peran sentral dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama melalui pengumpulan dan pengalokasian sumber daya yang tepat sasaran (Mardiasmo, 2018). Pengelolaan keuangan publik yang baik memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan program dan proyek pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, melindungi lingkungan, dan memberdayakan komunitas lokal (Halim, 2019). Oleh karena itu, kebijakan keuangan publik harus dirancang sedemikian rupa agar mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan secara holistik.

Kota Baubau, sebagai salah satu daerah strategis di Indonesia, memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan keuangan publik yang optimal. Pemerintah Kota Baubau telah mengarahkan kebijakan keuangan publik untuk mendukung aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, seperti ekonomi inklusif, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal (Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau, 2021). Melalui alokasi anggaran yang proporsional pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ramah lingkungan, Kota Baubau berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan (Susanti & Rahman, 2020).

Praktik keuangan publik di Kota Baubau mencakup pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan transparansi fiskal yang tinggi (Yusuf et al., 2019). Implementasi sistem penganggaran ini telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi penggunaan dana pemerintah (Prasetyo, 2020). Selain itu, integrasi pertimbangan lingkungan dalam proses perencanaan dan penganggaran publik telah membantu Kota Baubau dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim (Lestari & Putra, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik di Kota Baubau juga menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran publik (Dewi, 2018). Partisipasi aktif masyarakat ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik tetapi juga memastikan bahwa program dan kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal (Setiawan & Ahmad, 2019).

Meskipun demikian, Kota Baubau menghadapi berbagai tantangan dalam optimisasi peran keuangan publik, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas institusional, dan koordinasi antar lembaga (Wahyudi, 2020). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau.

Penelitian ini meninjau peran keuangan publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan fokus khusus pada Kota Baubau. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara keuangan publik dan pembangunan berkelanjutan, namun kebanyakan berfokus pada aspek tertentu, seperti kebijakan fiskal atau alokasi anggaran di tingkat nasional. Penelitian tentang bagaimana pengelolaan keuangan publik di tingkat kota dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penelitian yang lebih mendalam terkait implementasi dan dampak kebijakan keuangan publik pada pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang digunakan untuk menilai peran keuangan publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau. Dengan mengintegrasikan analisis keuangan publik dan perspektif pembangunan berkelanjutan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat meningkatkan kontribusi keuangan publik dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di kota tersebut.

## KAJIAN TEORITIS

### Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Menurut UNDP (2020), pembangunan berkelanjutan memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang dan menghormati batas-batas ekosistem bumi. Tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan adalah: (1) Pilar Ekonomi: Menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan distribusi kesejahteraan ekonomi yang merata (World Bank, 2019); (2) Pilar Sosial: Mencakup keadilan sosial, akses yang setara terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat (OECD, 2021); dan (3) Pilar Lingkungan: Fokus pada pelestarian ekosistem, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab (IPCC, 2022). Di Indonesia, konsep pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan dalam kebijakan nasional seperti RPJMN, yang menekankan pendekatan holistik dalam mencapai tujuan pembangunan (Bappenas, 2023).

## Keuangan Publik

Keuangan publik adalah bidang yang mempelajari pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Mardiasmo (2021) menyebutkan bahwa keuangan publik berfokus pada pengumpulan, alokasi, dan pengawasan dana publik untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi utama keuangan publik meliputi: (1) Fungsi Alokasi: Mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk barang dan jasa publik seperti pendidikan dan infrastruktur (Musgrave & Musgrave, 2019); (2) Fungsi Distribusi: Menggunakan kebijakan fiskal untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil (Bird & Zolt, 2020); dan (3) Fungsi Stabilisasi: Kebijakan fiskal digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk pengendalian inflasi dan pengangguran (Blanchard, 2020).

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama keuangan publik, yang mencakup pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan (Stiglitz & Rosengard, 2019). Reformasi keuangan publik di Indonesia telah diarahkan pada peningkatan efisiensi anggaran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta menjaga keberlanjutan fiskal (World Bank, 2020; IMF, 2021).

## Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan tertentu. Howlett dan Ramesh (2020) menyatakan bahwa kebijakan publik meliputi proses perumusan, implementasi, dan evaluasi untuk mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan. Proses ini melibatkan beberapa pendekatan, seperti: (1) Pendekatan Rasional: Menggunakan logika dan data empiris dalam pembuatan kebijakan, dengan analisis *cost-benefit* (Weimer & Vining, 2021); (2) Pendekatan *Incremental*: Kebijakan dibuat melalui perubahan berta-hap, memungkinkan penyesuaian berdasarkan pengalaman (Lindblom, 2020); dan (3) Pendekatan Kelembagaan: Menekankan peran lembaga pemerintah dalam proses kebijakan (March & Olsen, 2019).

H1: Kebijakan Keuangan Publik berpengaruh terhadap Pembangunan Berkelanjutan.

H2: Praktik Keuangan Publik berpengaruh terhadap Pembangunan Berkelanjutan.

## Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran publik penting untuk transparansi dan akuntabilitas, serta untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program pembangunan (Mansuri & Rao, 2021; Lopez et al., 2019). Keterlibatan masyarakat memastikan kebijakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan lokal dan memperkuat dampak positif pada komunitas (Gaventa & Barrett, 2020).

H3: Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pembangunan Berkelanjutan.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan publik dan kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Jha dan Lütkenhorst (2020) menekankan bahwa alokasi anggaran yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti ekonomi hijau, sangat penting. Kim dan Park (2021) menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang strategis untuk memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Penelitian oleh Lopez et al. (2019) dan Adams & Forsyth

(2022) menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dan penyesuaian kebijakan lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan keuangan publik, praktik keuangan publik, dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut menggunakan teknik statistik yang sesuai. Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kota Baubau, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Populasi adalah seluruh masyarakat Kota Baubau yang berjumlah 166.150 jiwa (BPS, pembaruan 28 Juni 2024). Berdasarkan jumlah populasi yang ada, selanjutnya jumlah sampel ditetapkan berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan *margin of error* 5%, sehingga jumlah sampel ditetapkan sebanyak 399 responden.

Data dikumpulkan langsung melalui kuesioner yang dirancang untuk mendapatkan informasi mengenai Kebijakan Keuangan Publik (X1), Praktik Keuangan Publik (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), dan Pembangunan Berkelanjutan (Y). Kuesioner menggunakan skala Likert untuk menilai persepsi responden. Selain data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner, penelitian data penelitian ini juga bersumber dari data sekunder yang meliputi: (1) Dokumen dan Laporan Resmi dari pemerintah Kota Baubau mengenai kebijakan, praktik, dan laporan pembangunan berkelanjutan; (2) Literatur dan penelitian terdahulu yang berupa artikel jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya; dan (3) Statistik dan data publik. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan:

### 1. Uji Persyaratan Instrumen yakni:

Uji Validitas: Menggunakan teknik korelasi *product moment* untuk menentukan keabsahan instrumen.

Uji Reliabilitas: Menggunakan *Cronbach's Alpha* untuk mengukur konsistensi instrumen (nilai  $> 0,60$  dianggap reliabel).

### 2. Uji Persyaratan Analisis Data:

Uji Normalitas: Menggunakan grafik *Normal Plot of Regression Standardized Residual*.

Uji Heteroskedastisitas: Menggunakan grafik *scatterplot* untuk mendeteksi ketidak-samaan varians residual.

Uji Linearitas: Menggunakan uji linearitas untuk memastikan hubungan linear antara variabel independen dan dependen.

Uji Multikolinearitas: Menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk mendeteksi korelasi antarvariabel independen.

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda:

Persamaan Regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan: Y=pembangunan berkelanjutan;  $\alpha$ =konstanta;  $\beta_1$ =koefisien variabel kebijakan keuangan publik;  $X_1$ =variabel kebijakan keuangan publik;  $\beta_2$ =koefisien variabel praktik keuangan publik;  $X_2$ =variabel praktik keuangan publik;  $\beta_3$ =koefisien variabel partisipasi masyarakat;  $X_3$ =variabel partisipasi masyarakat; dan  $\epsilon$ =eror.

#### 4. Uji Hipotesis:

Uji Parsial (Uji t): Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Simultan (Uji F): Untuk menguji pengaruh simultan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2014), uji validitas adalah pengujian untuk menentukan keabsahan suatu instrumen penelitian, memastikan bahwa instrumen tersebut mengukur dengan tepat sesuai tujuan yang diinginkan. Instrumen dianggap valid jika memiliki nilai probabilitas (sig)  $< 0,05$  dan menunjukkan nilai *Pearson Correlation* yang positif.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kebijakan Keuangan Publik (X1)**

Variabel	Butir	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	Keterangan
Kebijakan Keuangan Publik (X1)	1	0,000	,399	Valid
	2	0,000	,631	
	3	0,000	,552	
	4	0,000	,650	
	5	0,000	,553	

Tabel 1 menunjukkan hasil analisis korelasi antara item pernyataan dalam variabel Kebijakan Keuangan Publik (X1) adalah valid. Berdasarkan *output "correlations"* diketahui bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* untuk hubungan atau korelasi antara seluruh butir pernyataan variabel Kebijakan Keuangan Publik (X1) adalah sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05 dan nilai *Pearson Correlation* yang positif.

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Praktik Keuangan Publik (X2)**

Variabel	Butir	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	Keterangan
Praktik Keuangan Publik (X2)	1	0,000	,564	Valid
	2	0,000	,554	
	3	0,000	,602	
	4	0,000	,541	
	5	0,000	,627	
	6	0,000	,651	
	7	0,000	,664	
	8	0,000	,574	

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis korelasi antara item pernyataan dalam variabel Praktik Keuangan Publik (X2) adalah valid. Berdasarkan *output "correlations"* diketahui bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* untuk hubungan atau korelasi antara seluruh butir pernyataan

variabel Praktik Keuangan Publik (X2) adalah sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05 dan nilai *Pearson Correlation* yang positif.

**Tabel 3. Partisipasi Masyarakat (X3)**

Variabel	Butir	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	Keterangan
Partisipasi Masyarakat (X3)	1	0,000	,532	Valid
	2	0,000	,666	
	3	0,000	,635	
	4	0,000	,620	

Tabel 3 menunjukkan hasil analisis korelasi antara butir pernyataan dalam variabel Partisipasi Masyarakat (X3) adalah valid. Berdasarkan *output "correlations"* diketahui bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* untuk hubungan atau korelasi antara seluruh butir pernyataan variabel Partisipasi Masyarakat (X3) adalah sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05 dan nilai *Pearson Correlation* yang positif.

**Tabel 4. Pembangunan Berkelanjutan (Y)**

Variabel	Butir	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	Keterangan
Pembangunan Berkelanjutan (Y)	1	0,000	,166	Valid
	2	0,000	,502	
	3	0,000	,389	
	4	0,000	,582	
	5	0,000	,586	
	6	0,000	,654	
	7	0,000	,521	
	8	0,000	,529	
	9	0,000	,566	
	10	0,000	,582	
	11	0,000	,303	
	12	0,000	,567	

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis korelasi antara butir pernyataan dalam variabel Pembangunan Berkelanjutan (Y) adalah valid. Berdasarkan *output "correlations"* diketahui bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* untuk hubungan atau korelasi antara seluruh butir pernyataan variabel Pembangunan Berkelanjutan (Y) adalah sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05 dan nilai *Pearson Correlation* yang positif.

### Uji Reliabilitas

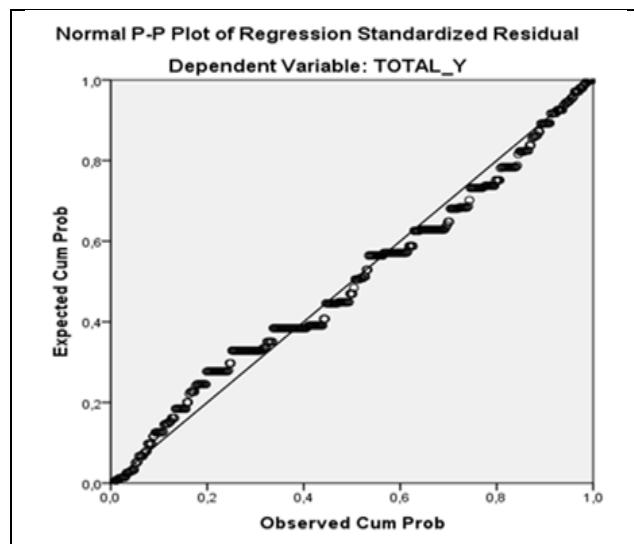
Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's alpha* seluruh variabel dalam penelitian ini melebihi batas 0,60, yang menunjukkan bahwa alat ukur atau kuesioner untuk variabel Kebijakan Keuangan Publik (X1), Praktik Keuangan Publik (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), dan Pembangunan Berkelanjutan (Y) adalah andal.

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	N of items	Cronbach's Alpha	Reliabilitas	Keterangan
Kebijakan Keuangan Publik (X1)	5	1,000	Cronbach's Alpha > 0,60	Reliabel
Praktik Keuangan Publik (X2)	8	0,997		
Partisipasi Masyarakat (X3)	4	0,781		
Pembangunan Berkelanjutan (Y)	12	0,944		

## Uji Normalitas

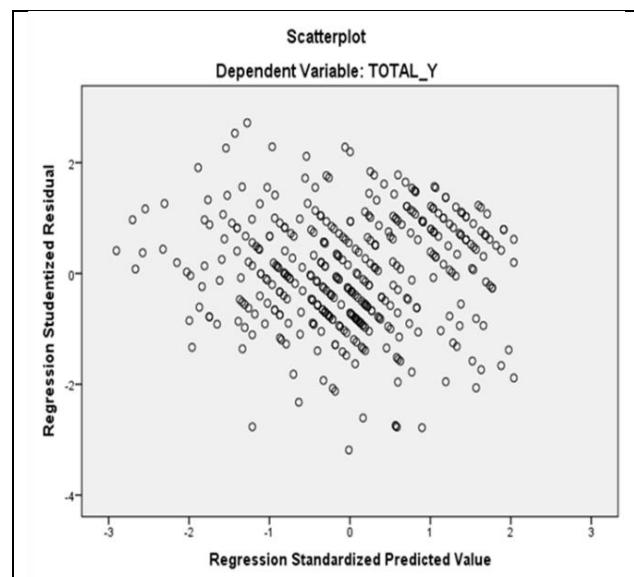
Menurut Sugiyono (2014), uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah residual yang diperoleh dalam sebuah model memiliki distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan normalitas data dapat dilihat melalui grafik *Normal Plot of Regression Standardized Residual* (Gambar 1).



**Gambar 1. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

## Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, heteroskedastisitas diidentifikasi dengan mengamati grafik *scatterplot*. Adapun hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 2.



**Gambar 2. Hasil Heteroskedastisitas**

Berdasarkan Gambar 2, *scatterplot* menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi yang diuji, karena titik-titik tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu. Ini berarti bahwa varians residual bersifat konstan dan tidak bergantung pada nilai prediksi, yang merupakan kondisi ideal dalam regresi linear.

### Uji Linearitas

Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Jika nilai signifikansi *Deviation from Linearity* lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

**Tabel 6. Hasil Uji Linearitas**

Variabel	Sig. <i>Deviation from Linearity</i>	Signifikansi	Keterangan
Pembangunan Berkelanjutan (Y)*	0,100	> 0,05	Linear
Kebijakan Keuangan Publik (X1)			
Pembangunan Berkelanjutan (Y)*	0,207	> 0,05	Linear
Praktik Keuangan Publik (X2)			
Pembangunan Berkelanjutan (Y)*	0,281	> 0,05	Linear
Partisipasi Masyarakat (X3)			

Berdasarkan Tabel 6, nilai signifikansi hubungan antara variabel dependen, yaitu Pembangunan Berkelanjutan (Y), dengan variabel independen Kebijakan Keuangan Publik (X1), Praktik Keuangan Publik (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3) menunjukkan nilai signifikansi *Deviation from Linearity* besar dari 0,05. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan yang signifikan dari linearitas dalam hubungan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut bersifat linear.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolininearitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Asumsi yang digunakan adalah jika nilai *VIF* < 10 atau nilai *Tolerance* > 0,01, maka model tersebut dianggap bebas dari masalah multikolinieritas. Ada pun hasil uji multikolinieritas penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 7 tersebut, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari setiap variabel independen pada penelitian ini adalah > 0,01, di mana nilai *tolerance* dan menunjukkan bahwa nilai *VIF* dari setiap variabel independen adalah < 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas.

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Kebijakan Keuangan Publik (X1)	0,923	1,083	Tidak terjadi multikolinearitas
Praktik Keuangan Publik (X2)	0,835	1,198	Tidak terjadi multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,882	1,134	Tidak terjadi multikolinearitas

## Analisis Regresi Linear Berganda

Metode ini digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan fungsional atau kausal antara beberapa variabel independen (Sugiyono, 2014). Ada pun hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada Tabel 8.

**Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>	
	B	Unstandardized Coefficients Std. Error
(Constant)	9,087	1,712
1 Kebijakan Keuangan Publik (X1)	1,565	0,065
Praktik Keuangan Publik (X2)	0,158	0,037
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,211	0,069

<sup>a</sup>Dependent Variable: Pembangunan Berkelanjutan

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 9,087 + 1,565 * X_1 + 0,158 * X_2 + 0,211 * X_3 + e$$

Berdasarkan hasil pengolahan data, konstanta bernilai positif 9,087 menunjukkan pengaruh searah antara variabel independen dan dependen. Koefisien regresi untuk Kebijakan Keuangan Publik (X1) sebesar 1,565, Praktik Keuangan Publik (X2) sebesar 0,158, dan Partisipasi Masyarakat (X3) sebesar 0,211, masing-masing menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada variabel-variabel tersebut akan meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan sebesar 1,565, 0,158, dan 0,211, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.

### Uji t

Kriteria uji t adalah: (1) jika nilai signifikansi uji  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen; (2) jika nilai signifikansi uji  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

**Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	t	Sig.	$\alpha$	Kesimpulan
1 (Constant)	5,308	0,000		
Kebijakan Keuangan Publik (X1)	24,125	0,000		Berpengaruh
Praktik Keuangan Publik (X2)	4,248	0,000	0,05	Berpengaruh
Partisipasi Masyarakat (X3)	3,071	0,002		Berpengaruh

<sup>a</sup>Dependent Variable: Pembangunan Berkelanjutan (Y)

Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil uji t pada variabel Kebijakan Keuangan Publik (X1) dengan  $t = 24,125$ , Praktik Keuangan Publik (X2) dengan  $t = 4,248$ , dan Partisipasi Masyarakat (X3) dengan  $t = 3,071$ , semuanya memiliki tingkat signifikansi 0,000 dan 0,002 (lebih kecil dari 0,05), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Ini berarti ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Y).

## Uji F

Uji F (*F-test*) digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 0,05, hasil uji F dapat disimpulkan sebagai berikut (Ghozali, 2016): (1) Jika signifikansi  $F < 0,05$ ,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika signifikansi  $F > 0,05$ ,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 <i>Regression</i>	4443,029	3	1481,010	253,469	,000 <sup>b</sup>
<i>Residual</i>	2307,969	395	5,843		
Total	6750,997	398			

<sup>a</sup>Dependent Variable: TOTAL\_Y

<sup>b</sup>Predictors: (Constant), TOTAL\_X3, TOTAL\_X1, TOTAL\_X2

Berdasarkan Tabel 10,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, karena nilai F-hitung sebesar 253,469 dengan signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan dan variabel independen Kebijakan Keuangan Publik (X1), Praktik Keuangan Publik (X2), serta Partisipasi Masyarakat (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Y).

### **Pengaruh Variabel Kebijakan Keuangan Publik (X1) terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Y)**

Hasil uji t pada variabel Kebijakan Keuangan Publik (X1) menunjukkan nilai  $t = 24,125$  dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, menunjukkan bahwa Kebijakan Keuangan Publik berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Y). Penelitian ini sejalan dengan teori Keuangan Publik yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik untuk mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial (Mardiasmo, 2019).

Penelitian oleh Jha dan Lütkenhorst (2020) menemukan bahwa kebijakan keuangan publik yang fokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan berdampak positif terhadap pencapaian SDGs, mendukung temuan penelitian ini. Selain itu, Kim dan Park (2021) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang efektif meningkatkan efisiensi pengeluaran publik, yang sejalan dengan hasil penelitian ini dan menegaskan pentingnya kebijakan fiskal strategis.

Lopez et al. (2019) juga mendukung hasil penelitian ini dengan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan keuangan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kota Baubau.

## **Pengaruh Praktik Keuangan Publik (X2) terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Y)**

Hasil uji t pada variabel Praktik Keuangan Publik (X2) menunjukkan nilai t = 4,248 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima, yang menandakan bahwa Praktik Keuangan Publik berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Y). Temuan ini konsisten dengan teori manajemen keuangan publik yang menyatakan bahwa praktik pengelolaan keuangan yang baik dan terorganisir dapat secara langsung memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan yang transparan dan efisien meningkatkan penggunaan sumber daya dan dampak positif terhadap ekonomi dan masyarakat (Mardiasmo, 2019).

Penelitian terdahulu oleh Williams dan Perez (2020) mendukung hasil ini dengan menunjukkan bahwa praktik keuangan publik yang baik berkontribusi pada pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan. Mereka mengembangkan model evaluasi yang mengukur dampak kebijakan dan praktik keuangan terhadap berbagai aspek pembangunan, yang sejalan dengan hasil penelitian penulis. Selanjutnya, Kim dan Park (2021) juga menemukan bahwa praktik pengelolaan keuangan yang efisien dapat meningkatkan efektivitas pengeluaran publik untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, menegaskan pentingnya praktik keuangan yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal.

*Lopez et al.* (2019) menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam praktik keuangan publik tidak hanya memperbaiki pengelolaan anggaran tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat, yang pada gilirannya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya praktik keuangan yang baik untuk meningkatkan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan, mendukung temuan sebelumnya bahwa Praktik Keuangan Publik berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan tersebut.

## **Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X3) Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Y)**

Hasil uji t pada variabel Partisipasi Masyarakat (X3) menunjukkan nilai t sebesar 3,071 dengan tingkat signifikansi 0,002, yang lebih kecil dari 0,05, mengindikasikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa keterlibatan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan hasil proyek pembangunan berkelanjutan. Menurut Mansuri dan Rao (2021), partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan dapat meningkatkan relevansi kebijakan dan keberhasilan proyek, karena kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan lokal.

Selain itu, *Lopez et al.* (2019) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan publik. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dan proses perencanaan memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan sumber daya, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil penelitian penulis konsisten dengan temuan Lopez dan kolega, yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam pengelolaan publik memperkuat akuntabilitas dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Gaventa dan Barrett (2020) mengungkapkan bahwa keterlibatan komunitas dalam proyek pembangunan berkelanjutan memperbaiki hasil proyek dengan mengintegrasikan perspektif lokal dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini, sejalan dengan teori Gaventa dan Barrett (2020), yang menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan relevansi kebijakan tetapi juga memperkuat dampak positif dari proyek pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat yang kuat dalam pengelolaan dan perencanaan berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Keuangan Publik secara signifikan memengaruhi Pembangunan Berkelanjutan di Kota Baubau, menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Praktik Keuangan Publik juga terbukti berpengaruh positif, dengan praktik yang transparan dan efisien meningkatkan pencapaian hasil pembangunan. Selain itu, Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan, memperkuat peran masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Namun, keterbatasan penelitian ini meliputi cakupan yang terbatas hanya pada Kota Baubau, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk daerah lain. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan berbagai daerah dengan karakteristik berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh kebijakan, praktik, dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi untuk kebijakan meliputi penguatan praktik keuangan yang transparan dan partisipasi aktif masyarakat, guna memaksimalkan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Adams, R., & Forsyth, T. (2022). Localizing Sustainable Development Goals: The Role of Local Governments in Driving Change. *Urban Studies*, 59(7), 1357–1374.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2020). *Taxation and Redistribution in Developing Countries*. Cambridge University Press.
- Blanchard, O. (2020). *Fiscal Policy Under Low Interest Rates*. MIT Press.
- Cottarelli, C., & Kang, J. (2021). *Public Investment for Sustainable Growth*. International Monetary Fund.
- Dewi, S. A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Baubau. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145–158.
- Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau. (2021). *Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020*. Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau.

- Dunn, W. N. (2019). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2020). So What Difference Does It Make? Mapping the Outcomes of Citizen Engagement. *World Development*, 100, 5–19.
- Ghozali, I. (2016). *Applikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- IMF. (2021). *Fiscal Monitor: Strengthening Fiscal Credibility and Accountability*. International Monetary Fund.
- Jha, R., & Lütkenhorst, W. (2020). Public Finance for Sustainable Development: Addressing Systemic Challenges. *Development Policy Review*, 38(6), 735–752.
- Kim, S., & Park, H. (2021). Fiscal Policy and Public Spending Efficiency for Sustainable Development. *Journal of Environmental Economics and Policy*, 10(2), 237–256.
- Lestari, D., & Putra, A. H. (2021). Integrasi Pertimbangan Lingkungan dalam Penganggaran Publik di Kota Baubau. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 8(1), 55–68.
- Lindblom, C. E. (2020). The Science of “Muddling Through”. *Public Administration Review*, 19(2), 79–88.
- Lopez, M., Arce, G., & Rodriguez, J. (2019). Community Participation in Public Budgeting: Enhancing Transparency and Accountability. *Public Administration Review*, 79(3), 353–364.
- Lopez, M., Arce, G., & Rodriguez, J. (2019). Community Participation in Public Budgeting: Enhancing Transparency and Accountability. *Public Administration Review*, 79(3), 353–364.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2021). Localizing Development: Does Participation Work? *World Bank Research Observer*, 36(1), 23–49.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (2019). *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics*. Free Press.
- Mardiasmo, M. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset.
- Mardiasmo, M. (2021). *Keuangan Publik: Pendekatan Fiskal dalam Pembangunan Nasional*. Andi Offset.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2019). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill Book, Inc.
- OECD. (2021). *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies*. OECD Publishing.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2020). *Governance, Politics and the State*. Palgrave Macmillan.
- Prasetyo, B. W. (2020). Evaluasi Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Kota Baubau. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 5(3), 210–225.
- Setiawan, R., & Ahmad, T. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik di Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 89–102.

- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2019). *Economics of the Public Sector*. W.W. Norton & Company.
- Stone, D. (2021). *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*. W.W. Norton & Company.
- Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. CV Alfabeta.
- Susanti, E., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Prioritas terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Baubau. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 3(1), 35–48.
- UNDP. (2020). *Financing the Sustainable Development Goals in the Era of COVID-19 and Beyond*. United Nations Development Programme.
- Vedung, E. (2021). *Public Policy and Program Evaluation*. Routledge.
- Wahyudi, S. (2020). Tantangan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kota Baubau. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 120–134.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2021). *Policy Analysis: Concepts and Practice*. Routledge.
- Williams, J., & Perez, L. (2020). Assessing the Impact of Public Finance on Sustainable Development Indicators. *Ecological Economics*, 173, 106654.
- World Bank. (2020). *Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results*. The World Bank.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.
- Yusuf, M., Abdullah, R., & Kurniawan, D. (2019). Transparansi Fiskal dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Baubau. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(2), 75–88.